

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1.1 Hasil Penelitian

##### 1.1.1 Pelaksanaan program pembangunan berbasis Infrastruktur KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Ujung Sabbang kota Parepare

Ujung Sabbang adalah salah satu dari 22 kelurahan yang ada di kota Parepare berada di Kelurahan Ujung Sabbang, dengan kondisi topografi yang relatif datar berada di tepian air/laut. Secara geografis Kelurahan Ujung Sabbang terletak di S 04°00'34,4" dan E 119°02'25,84" dengan batas administrasi sebagai berikut:

Utara: Laut Timur, Kelurahan Kampung Pisang

Selatan: Kelurahan Mallusetasi

Barat: Laut

Luas total wilayah kelurahan Ujung Sabbang adalah 35.31 Ha atau 0,3531 Km<sup>2</sup> dengan penggunaan lahan pada umumnya berupa permukiman yang tersebar hampir disetiap wilayah kelurahan.

Jumlah penduduk di Kelurahan Ujung Sabbang di tahun 2017 berdasarkan data BPS adalah sebesar 3.590 jiwa yang terdiri dari 1.711 jiwa penduduk laki-laki dan 1.879 penduduk perempuan. Sedangkan menurut data baseline 100-0-100 yang dilakukan survey primer di tahun 2017 adalah 2.477 Jiwa yang terdiri dari 1.211 jiwa penduduk laki-laki dan 1.266 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kelurahan Ujung Sabbang menurut data BPS adalah 100 jiwa/Ha, dan hasil dari data baseline 100 – 0 – 100 yang direvisi 2017 menunjukkan tingkat kepadatan sebesar 73 jiwa/ha. Untuk lebih jelasnya akan diurai di dalam tabel mengenai kepadatan penduduk serta perbandingan dengan data baseline yang telah dilakukan di periode

2017.

#### 1.1.1.1 Penyusunan Program KOTAKU (kota tanpa kumuh)

##### A. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilaksanakan untuk membangun kapasitas, peran dan kontribusi Pemerintah Kelurahan, masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan Kelurahan dalam penyelenggaraan kolaborasi, dan penggalangan relawan untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman.

##### 1. Sosialisasi Kepada Masyarakat Setempat

Tujuan diselenggarakannya sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan program KOTAKU (kota tanpa kumuh) adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat terkait dalam kegiatan dari tahap penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, tahap pemeliharaan infrastruktur.

Sosialisasi di Kelurahan Ujung Sabbang di lakukan oleh FASKEL (Fasilitator Kelurahan). FASKEL merupakan secara terorganisasi, sistematis, dan yang termasuk mendorong peran serta dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, termasuk masyarakat miskin dan perempuan melalui serangkaian kegiatan pembelajaran dalam siklus kegiatan. Fasilitator bertugas melakukan transformasi pengetahuan dan ketrampilan guna memperkuat dan mengembangkan kemampuan relawan/kader-kader masyarakat sebagai agen pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat dan mengembangkan kapasitas KSM sebagai kelompok dinamik, mengenali peluang usaha atau mengembangkan usaha yang ada, dan pengelolaan keuangan secara sederhana.

Untuk dapat menjalankan tugas pokok tersebut, fasilitator memiliki tiga fungsi utama. Yakni, fasilitasi, berupa sekumpulan kegiatan yang pada intinya membuat sesuatu berjalan dengan baik dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Mediasi, yang pada intinya menjembatani beberapa pihak untuk dapat bekerjasama secara sinergik. Terakhir, advokasi yang pada intinya mengajak orang yang diadvokasi untuk berpikir seperti dia yang mengadvokasi. Terkait dengan fungsi fasilitasi, pada tahap awal kegiatan dulu rekan-rekan para Faskel misalnya memberikan penyadaran kepada masyarakat seperti, mengapa diperlukan FGD (*Focus group discussion*) refleksi kemiskinan, mengapa diperlukan pemetaan swadaya, mengapa diperlukan pembentukan BKM, dan mengapa diperlukan penyusunan PJM Pronangkis. Saat ini, rekan-rekan Faskel harus memberikan penyadaran kepada masyarakat mengapa diperlukan panitia/KSM, mengapa diperlukan proposal kegiatan atau rencana kegiatan, mengapa diperlukan laporan pertanggung jawaban baik dari panitia/KSM maupun BKM, mengapa diperlukan papan informasi kegiatan dan papan proyek, mengapa diperlukan bukti-bukti transaksi seperti meterai, dan lain-lain. Ketiga fungsi tersebut dalam prakteknya berbaur. Misalnya, pada saat mediasi juga akan terjadi proses fasilitasi ketika beberapa pihak bertemu dan advokasi ketika ada hal-hal yang masih perlu disepahamkan.

Materi sosialisasi yang diberikan terkait dengan program KOTAKU yang bertujuan untuk merubah permukiman yang tadinya kumuh menjadi Kawasan permukiman yang layak huni sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh KOTAKU.

“Pada tahapan penyusunan program dari pada setiap kelurahan, tentunya kita mempunyai empat indikator yang menjadi poin utama. Yang pertama ialah tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi program. Dari keempat tahapan ini saling berkaitan dan peran dari

berbagi pihak sangat mempengaruhi berjalan dan lancarnya suatu program”.<sup>1</sup>

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa tehnis pelaksanaan program yang dilalui dengan 4 tahap utama yaitu, persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Serta program yang berkaitan tentang pentingnya partisipasi masyarakat yang sangat bermanfaat bagi mereka dalam hal ini kolaborasi antara berbagai pihak.

## 2. Pembentukan/Penguatan Kelembagaan Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP)

TIPP merupakan tim Perencanaan Partisipatif Penataan Lingkungan Permukiman tingkat Kelurahan yang didalamnya terdiri dari beberapa Pokja yang minimal sesuai dengan 7 (tujuh) indikator kumuh atau lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Jadi tujuan dari pembentukan/penguatan kelembagaan ini ialah keberfungsian lembaga perencanaan yang ada di kelurahan atau Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) penanganan permukiman kelurahan dan terbangunnya komitmen dan rencana kerja TIPP untuk memfasilitasi perencanaan partisipatif”.<sup>2</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut Program KOTAKU juga bertujuan untuk bagaimana membentuk serta memberikan penguatan pada setiap lembaga yang ada di Kelurahan. Sebagaimana korelasi konsep islam terhadap pembangunan manusia itu penting guna mengembangkan pengetahuan dan potensi manusia.

Pembangunan sumber daya Insani/manusia yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan pekerja, demikian juga dengan kompetensi-kompetensi yang dikembangkan melalui pelatihan dan pengembangan, pembelajaran organisasi, manajemen kepemimpinan, dan manajemen pengetahuan untuk kepentingan peningkatan kinerja.

---

<sup>32</sup> Iwan, Fasilitator KOTAKU, Wawancara pada tanggal 9 Februari 2021

<sup>2</sup> Iwan, Fasilitator KOTAKU, Wawancara pada tanggal 9 Februari 2021

Dalam pembangunan sumber daya insani/manusia, fokus utama dilakukan pada beberapa orientasi, yaitu pendidikan, orientasi spiritual, dan pengembangan struktur hubungan yang berbasis kepada kerjasama, perkongsian dan penyerataan.

Hal ini selaras dengan pembangunan berbasis infrastruktur di Kelurahan Ujung Sabbang, dimana pembangunan masyarakat dari indikator pendidikan dengan melakukan pelatihan-pelatihan pada saat sebelum pelaksanaan kegiatan berlangsung. Begitu pula tahapan sosialisasi agar masyarakat yang sebelumnya tidak tahu akan pelaksanaan dan mekanisme pelaksanaan program ini menjadi mengetahui dengan jelas.

Pengembangan struktural dengan membangun hubungan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait pada pelaksanaan program, dalam hal ini pemerintah kelurahan, tim KOTAKU, LKM (lembaga keswadayaan masyarakat), dan masyarakat. Pengembangan struktural ini sangat penting dalam pelaksanaan program, karena jika hubungan kerjasama satu sama lain tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya maka pelaksanaan program tidak akan berjalan dengan baik.

Sebagaimana manusia didasarkan pada ketundukan pada aturan Allah swt. Pembangunan harus dilakukan dan diarahkan dalam hal bentuk kerjasama. Tentunya ini semua diarahkan untuk melaksanakan segala ketentuannya. Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia hadir sebagai hamba Allah, juga sekaligus mewakili Allah di muka bumi yang bertugas untuk memakmurkan bumi.

#### B. Tahap Perencanaan

Tahap Perencanaan dimulai dengan tahapan merumuskan kondisi permukiman layak huni yang diinginkan oleh masyarakat pada masa mendatang yang dituangkan kedalam visi dan misi pembangunan lingkungan permukiman tingkat

kelurahan/desa yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan refleksi perkara kritis tentang masalah perikehidupan dan penghidupan (livelihood), lingkungan permukiman yang kumuh, kemiskinan, kesehatan, bencana juga difabilitas. Untuk melihat kondisi apa yang direfleksikan oleh masyarakat dalam FGD perkara kritis, TIPP melakukan Pemetaan Swadaya untuk memetakan kondisi-kondisi dengan basis data baseline 100-0-100 yang kemudian dipertajam kedalam masing-masing aspek termasuk masalah livelihood, kebencanaan, gender dan penafisan terhadap dampak lingkungan dan sosial.

“Jadi pada proses perencanaan kita lakukan pertemuan dengan masyarakat yang di daerahnya terlaksana untuk program Kotaku. Kemudian muncul lah berbagai usulan kegiatan, misalnya dari segi infrastruktur mana yang harus diperbaiki atau ditangani. Setelah selesai ini, maka dibentuklah panitia yaitu dari masyarakat sendiri atau KSM, kemudian fasilitator dari KOTAKU sisa mendampingi jalannya perencanaan terkait anggaran biaya program. Setelah mendapatkan persetujuan baik dari kantor KOTAKU maupun kantor PU, selanjutnya dilakukan pelaksanaan kegiatan yang terlibat tentunya dari masyarakat kami fasilitator sisa mengawasi, apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan RAB”.<sup>3</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan diatas, bapak Iwan dalam hal ini selaku Tim dari KOTAKU atau tepatnya FASKEL yang menangani Kelurahan Ujung Sabbang juga menjelaskan tentang proses perencanaan, mulai dari sosialisasi ke masyarakat baik itu pada tahap pembentukan panitia KSM maupun pada saat pengusulan suatu program.

Dari hasil kajian Pemetaan Swadaya TIPP Bersama tim pendamping menuangkan kedalam dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) atau perencanaan yang setara. Dokumen RPLP ini merupakan rencana makro Kelurahan/desa yang memuat arahan pencegahan dan rencana peningkatan kualitas

---

<sup>3</sup>Iwan, Fasilitator KOTAKU, Wawancara Pada Tanggal 9 Februari 2021

permukiman kumuh yang terintegrasi antar Kelurahan/desa yang berbatasan maupun dengan rencana tingkat kotanya. Adapun tahapan perencanaan secara umum dapat adalah sebagai berikut:

1. Membangun Visi Visi

Permukiman yang dimaksud adalah upaya masyarakat dalam mendalami visi Pemerintah kabupaten/kota yang ada dalam RPJMD, khususnya yang terkait dengan visi pembangunan permukiman dan pelayanan infrastrukturnya.

2. Refleksi Perkara Kritis (RPK)

Berdasarkan hasil visi & misi Permukiman, kemudian dilaksanakan Refleksi Perkara Kritis (RPK) dengan tujuan menumbuhkan kesadaran kritis dan kepedulian masyarakat serta menggali akar penyebab, karakteristik terjadinya kumuh termasuk didalamnya merefleksikan tentang penghidupan masyarakat (livelihood), bencana yang pernah terjadi, kesetaraan dan keadilan masyarakat dalam pembangunan serta dampak-dampak sosial dan lingkungan yang pernah terjadi pada pembangunan permukiman sebelumnya.

3. Pemetaan Swadaya (PS)

Pengertian PS (Pemetaan Swadaya) Adalah proses kajian dalam menemu kenali persoalan (lingkungan, sosial, ekonomi) dan potensi-potensi terhadap asset sumber daya manusia, alam, sosial, ekonomi serta infrastruktur serta kajian dalam memetakan akar persoalan yang dihadapi oleh masyarakat terhadap kondisi riil/eksisting kawasan permukiman diwilayah Kelurahanl. Data baseline 100-0-100 dan profil permukiman kelurahan/desa merupakan data yang digunakan oleh TIPP sebagai data untuk mempertajam kegiatan Pemetaan Swadaya. Pemetaan Swadaya dilaksanakan oleh TIPP bersama masyarakat yang dilakukan ditingkat Rt/Rw sampai

penyepakatan terhadap kondisi masalah, potensi dan usulan/gagasan masyarakat dalam upaya mewujudkan visi dan misi masyarakat.

Secara umum tahapan PS (pemerataan swadaya) terdiri dari:

a. Persiapan pemetaan.

Dalam persiapan pemetaan dilakukakn pembentukan kelompok kerja (pokja) pemetaan swadaya dalam hal ini yang akan berkerja pada proses pelaksanaan prasarana, pelatihan serangkaian pemetaan swadaya, dan sosialisasi hasil pemetaan.

“Pada tahap persiapan pemetaan kami melakukan pembentukan kelompok kerja (pokja) dalam pemetaan swadaya. Proses pembentukan kelompok kerja (pokja) secara transparan dengan melibatkan sebanyak-banyaknya relawan atau masyarakat kelurahan. Adapun relawan yaitu masyarakat sedangkan fasilitatornya adalah fasilitator kelurahan (faskel).”<sup>4</sup>

b. Pemetaan dan kajian gambaran umum kelurahan

Pada pelaksanaan proses pemetaan gambaran umum kelurahan dilakukan penyusunan ceklist data, rencana kerja survei, pembagian tugas dan wilayah kerja. Setelah itu melaukan transek dan pengamatan lapangan atas wilayah Kelurahan, mengamati dan mencatat kondisi system pelayanan sarana dan prasarana di Kelurahan, melakukan penyelarasan dan menyatukan hasil pengamatan lapangan, dan melakukan penyajian data pemetaan swadaya dalam bentuk dokumentasi.

“Setelah persiapan kegiatan dilakukan kegiatan pemetaaan dan kajian gambaran umum kelurahan. Dengan melakukan transek serta mengamati wilayah Kelurahan kami juga mencatat hal-hal yang penting di lapangan.”

c. Pemetaan dan kajian profil permukiman kumuh

---

<sup>4</sup> Muhtar, Kordinator Kota KOTAKU, Wawancara pada tanggal 18 Maret 2021

Pada pemetaan kajian profil permukiman/pemukiman kumuh dengan melakukan transek sesuai dengan indikator permukiman. Yaitu dengan kepadatan bangunan, kelayakan bangunan, aksesibilitas lingkungan, drainase lingkungan, pelayanan air bersih, pengelolaan air limbah dan pengelolaan persampahan.

“Dalam pemetaan kajian profil kumuh tidak jauh beda yah dengan proses pemetaan gambaran umum pada kelurahan, hanya saja berbeda dari indikatornya.”<sup>5</sup>

d. Pemetaan gambaran kondisi sosial dan ekonomi

Pada Pelaksanaan pemetaan kondisi sosial dan ekonomi dilakukan dengan pemetaan/transek sebagaimana upaya untuk mengetahui gambaran kondisi sosial dan ekonomi. Dengan memperhatikan indikator-indikator tentunya, seperti tingkat pengangguran, tingkat kesejahteraan, dan tingkat kondusifitas.

“Dalam pemetaan kondisi sosial juga sama metodenya, yaitu kami melakukan metode transek namun dengan indikator yang berbeda, yaitu kita fokuskan melihat tingkat pengangguran di Kelurahan Ujung Sabbang secara khusus saja.”<sup>6</sup>

e. Pemetaan gambaran kondisi rawan bencana

Pada pelaksanaan pemetaan gambaran kondisi rawan bencana dilakukan sesuai dengan indikator terhadap pemetaan gambaran kondisi rawan bencana, seperti memetakan curah hujan, memetakan penggunaan lahan, dan memetakan kemiringan lereng. Hal ini dilakukan agar pada saat pelaksanaan program dilakukan dapat memperhatikan indikator pemetaan yang sudah dipetakan.

“Jadi dalam pemetaan kondisi rawan bencana, juga pada pemetaan swadaya kita menggunakan metode transek. Dengan melihat tingkat

---

<sup>5</sup>Muhtar, Kordinator Kota KOTAKU, Wawancara pada tanggal 18 Maret 2021

<sup>6</sup>Muhtar, Kordinator Kota KOTAKU, Wawancara pada tanggal 18 Maret 2021

resiko bencana pada Kelurahan yang terlaksana program.<sup>7</sup>

4. Tahap Penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP)

Pengertian RPLP:

a. Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP dengan kedalaman rencana

teknis) merupakan dokumen perencanaan permukiman/permukiman kumuh kelurahan/desa yang disusun secara partisipatif dengan mewujudkan keterpaduan/keselarasan perencanaan tingkat kelurahan/desa dan perencanaan tingkat Kabupaten/Kota.

b. RPLP merupakan dokumen rencana 5 (lima) tahun sebagai instrumen kolaborasi Kelurahan/Desa dalam penanganan permukiman kumuh yang disusun untuk mencapai 0 persen kumuh di kelurahan dan mencegah tumbuhnya kumuh baru.

c. RPLP juga memuat mengenai perencanaan penanganan permukiman kumuh yang komprehensif, mencakup aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Rencana penataan lingkungan permukiman secara spasial, yang terkonsolidasi dengan RP2KPKP maupun rencana peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman kumuh tingkat kota maupun kelurahan lainnya. RPLP disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan dan dampak sosial, gender, kelompok rentan (anak-anak, lansia, dan disabilitas), serta pengurangan resiko bencana.

d. RPLP memuat rencana aksi keterpaduan program dari berbagai sumber pendanaan termasuk swadaya masyarakat, yang dibutuhkan untuk mendukung rencana penanganan tujuh aspek kumuh dan sosial ekonomi.

---

<sup>7</sup> Muhtar, Kordinator Kota KOTAKU, Wawancara pada tanggal 18 Maret 2021

“Kami bergerak dasarnya dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang di sahkan oleh walikota beserta SK Walikota. SK Walikota ini mengatakan bahwa titik kumuhnya di Kawasan ini, titik kumuhnya sekian hektar, seperti kemarin di ujung sabbang yang menjadi titik ialah di Kawasan Kalimantan dan Kawasan Sulawesi. Keluaran dari SK Walikota, kemudian kami tindak lanjuti, apa saja yang menjadi persoalan kemudian kami susun dalam Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP)”<sup>8</sup>.

Hasil wawancara dengan FASKEL (fasilitator kelurahan) atau pak Iwan menjabarkan hal yang mendasari proses penyusunan program KOTAKU dari terbitnya SK yang diteritkan dalam hal ini pemerintah atau Walikota sampai tahap penyusunan RPLP. RPLP ini disusun oleh TIPP Bersama LKM yang didampingi oleh pendamping (Tim Fasilitator) dan Tim Koordinator Kota (bila diperlukan). Hasil RPLP ini dilanjutkan dengan penyusunan rencana teknis yang akan dikaji dan dibahas lebih dalam oleh TIPP dilokasi prioritas yang termasuk dalam permukiman kumuh yang telah disepakati akan ditangani secara keterpaduan oleh berbagai sektor.

Pertambahan pengeluaran yang bermanfaat dalam perencanaan merupakan urgensi yang perlu diperhatikan, yang dituamakan adalah pengeluaran yang mengutamakan keperluan dasar. Dalam hal ini adalah kebutuhan primer atau *dharuriyat* yang mana pada konsep pembangunan dalam Islam mengutamakan kepentingan keperluan dasar sebagaimana pada proses pelaksanaan suatu program KOTAKU mengutamakan keperluan dasar masyarakat.

*Dharuriyyat* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia. Keperluan dan perlindungan *Dharuriyyat* ini dalam buku ushul *fiqh*, termasuk as-Syithibi, membagi menjadi lima buah, yaitu pemenuhan keperluan serta perlindungan yang diperlukan untuk:

---

<sup>8</sup> Iwan, Fasilitator KOTAKU, Wawancara pada tanggal 9 Februari 2021

1. keselamatan agama (ketaatan ibadah kepada Allah SWT)
2. keselamatan nyawa (perindividu)
3. keselamatan akal (termasuk hati nurani),
4. keselamatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia) serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seorang dan
5. keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seorang.

*Dharuriyat* atau kebutuhan primer selaras dengan pelaksanaan pembangunan program KOTAKU (kota tanpa kumuh). Sebagaimana dalam mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai selesainya kegiatan mengutamakan kebutuhan dasar. Hal ini tentunya dibuktikan dengan masukan dari masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dikumpulkan pada tahapan sosialisasi program lalu kemudian ditetapkan menjadi kebutuhan mendasar.

Aspek yang kemudian menjadi kebutuhan dasar ialah keselamatan para pekerja yang terlibat dalam pembangunan, keselamatan akal dalam artian mengeluarkan saran dan masukan, serta merawat hasil dari pelaksanaan program pembangunan sebagaimana konsep *dharuriyat* atau kebutuhan primer. Oleh sebab itu tujuan yang bersifat dharuriat adalah tujuan utama pencapaian dalam kehidupan yang abadi bagi manusia.

#### 1.1.1.2 Pelaksanaan Program KOTAKU

Tahapan pelaksanaan merupakan implementasi kegiatan baik kegiatan sosial, ekonomi maupun infrastruktur yang telah disusun dalam dokumen RPLP. Pelaksanaan semua kegiatan harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Adapun sumber pembiayaan kegiatan pembangunan yang didapat berasal dari

beberapa sumber yaitu APBN/ bantuan dana investasi, APBD, dana Kelurahan, Swasta, maupun dari swadaya.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan pada program KOTAKU (kota tanpa kumuh) di Kelurahan Ujung Sabbang, reponden menjelaskan pelaksanaan apa saja yang dilaksanakan pada proses pembangunan. Responden dal hal ini yang turut mengawasi yaitu dari pihak pemerintah kelurahan juga.

“Pada tahap pelaksanaan ini selain selokan yang dibangun, mengholnya atau sudah termasuk penutupnya, kalau yang lain seperti sarana pengaspalan itu adalah dana kelurahan. Begitupun dengan pengecatan tembok. Tidak lupa pula pembenahan trotoar yang ada di jalan Kalimantan. Dalam pembangunan troatoar ini kami meninjau sebelumnya mana selokan yang layak dibanguni troatoar diatasnya, karena ada yang tidak layak, seperti halnya yang berada di depan rumah masyarakat yang berimpitan dengan selokan depan rumah”.<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Amin Koppe selaku pihak pemerintah kelurahan yang juga berpartisipasi dalam hal pengawasan proses pelaksanaan pembangunan, menyebutkan apa saja yang terlaksana pada program KOTAKU. Beliau juga menambahkan terkait pembagian pelaksanaan KSM (kelompok swadaya masyarakat) dan program yang belum terlaksana.

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan sosial ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam proses pembagunan. Pembangunan teknologi dan inovasi adalah salah satu dalam proses perubah dalam tatanan sosial ekonomi. Teknologi dan inovasi menjadi suatu kebutuhan yang perlu didesain secara serius oleh pemerintah.

---

<sup>9</sup> Aminn Koppe, Pemerintah Kelurahan Ujung Sabbang, Wawancara Pada Tanggal 2 Februari 2021

Islam adalah ajaran agama yang memerintahkan umatnya untuk senantiasa inovatif, manakala masyarakat memahami kewajibannya untuk menghasilkan karya melalui proses-proses yang kreatif dan inovatif. Hal ini selaras dengan pelaksanaan program KOTAKU (kota tanpa kumuh) yang telah berlangsung di Kelurahan Ujung Sabbang.

Dalam pelaksanaan program KOTAKU. KOTAKU menciptakan teknologi atau inovasi terbaru, dalam hal ini wujud dari inovasi baru dengan adanya pembangunan drainase yang mengadopsi lorong di atasnya. Pembangunan ini terlaksana di wilayah Jl. Tarakan Kelurahan Ujung Sabbang. Selain itu, drainase yang berada di pinggir jalan raya di desain dengan model konsep memakai penutup yang bisa dikontrol sewaktu-waktu. Hasil dari pelaksanaan pembangunan ini dinilai berhasil menangani genangan air hujan disaat curah hujan yang tinggi, atau banjir sekalipun.

Inovasi baru yang kemudian muncul juga adalah pengecatan tembok yang berada di beberapa sudut pada wilayah Jl. Kalimantan Kelurahan Ujung Sabbang. Upaya teknologi baru atau inovasi baru yang kemudian didesain dari KOTAKU diharapkan dapat meninggalkan kesan kumuh pada kota menjadi lebih baik dari sebelumnya.

“Masing-masing KSM kita bagi dua, dari semua program yang terskedul alhamdulillah hampir semua terlaksana, cuman satu yang tidak terlaksana, yaitu terkait dengan dana bergulir. Kenapa demikian, karena teman-teman yang ada di lkm belum ada yang sepatat untuk menjalankan itu karena menilai itu susah. Kalau yang lain-lain bagus, sudah terlaksana, selokan sudah

indah dipandang, penataan tanaman-tanaman hias, masyarakat sudah ada respon untuk menanam tanaman di lingkungan rumah”.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Amin Koppe selaku pihak pemerintah Kelurahan Ujung Sabbang bahwa pihaknya juga berpartisipasi dalam hal pengawasan proses pelaksanaan pembangunan, terkait apa saja yang terlaksana pada program KOTAKU. Beliau juga menambahkan terkait pembagian pelaksanaan KSM (kelompok swadaya masyarakat) dan program yang belum terlaksana.

Mengenai pelaksanaan program kerja KOTAKU (kota tanpa kumuh) belum dapat berjalan sepenuhnya sesuai dengan program kerja yang telah disusun. Menurut keterangan bapak Amin Koppe selaku pihak pemerintah Kelurahan selaku yang mengawasi pada program KOTAKU. Pelaksanaan programnya memang banyak yang sudah dijalankan, tetapi masih terdapat beberapa program yang belum selesai.

#### 1.1.1.3 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan kontribusi masyarakat secara nyata, dan positif terhadap penyusunan dan pengimplementasian suatu pembangunan yang berada didaerahnya. Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan program KOTAKU (kota tanpa kumuh) di Kelurahan Ujung Sabbang diawali dengan adanya sosialisasi yang optimal dari pihak-pihak yang bertanggung jawab tentang pentingnya partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi sekali pada proses pembangunan pelaksanaan program KOTAKU, hal ini dibuktikan dengan wawancara peneliti dengan salah satu responden yang berada di Kelurahan Ujung Sabbang tepatnya di

---

<sup>10</sup> Amin Koppe, Pemerintah Kelurahan Ujung Sabbang, Wawancara pada tanggal 2 Februari 2021

wilayah jalan Tarakan.

“Alhamdulillah masyarakat aktif dalam partisipasi pada pelaksanaan program KOTAKU ini. Swadaya masyarakat sangat terasa, baik yang terlibat pada proses pengerjaan maupun swadaya dalam hal konsumsi bagi masyarakat yang bekerja”<sup>11</sup>.

Pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Ujung Sabbang sudah cukup baik, dimana masyarakat setempat dilibatkan dalam setiap kegiatan yang ada berdasarkan kebutuhan masyarakat, pelaksanaan pembangunan terealisasi maksimal karena dikerjakan oleh masyarakat sendiri. Kegiatan fisik yang dikerjakan oleh masyarakat setempat didampingi oleh para ahli agar hasil sesuai dengan yang diharapkan.

“Tukang yang digunakan dalam proses pengerjaan program pembangunan KOTAKU ini baik itu lorong, drainase, dan pembuatan bak sampah ialah masyarakat yang tinggal di wilayah yang terlaksananya program. Seperti halnya program ini terlaksana di wilayah Jl. Tarakan, maka tukang yang digunakan adalah masyarakat di wilayah jl. Tarakan. Tetapi seumpama memang tukang tidak mencukupi atau sama sekali tidak ada, maka bisa menggunakan tukang dari luar. Tetapi yang dimaksud bukan dalam artian tukang dari luar kelurahan melainkan di Kelurahan Ujung Sabbang sendiri. Dengan adanya program KOTAKU masyarakat sangat terberdayakan dengan adanya program ini”<sup>12</sup>.

Berdasarkan wawancara peneliti dan dari keterangan ibu Rasmiati diketahui bahwa program ini sangat berperan aktif dan memberikan hasil positif bagi masyarakat. Ibu Rosmiati yang juga adalah ketua KSM (kelompok swadaya masyarakat) Tarakan yang terlibat langsung dalam proses pengerjaan program KOTAKU pada tahun 2019 di Rw 9 Rt 2 di Kelurahan Ujung Sabbang.

Dalam pertemuan peneliti dengan tim KOTAKU dalam hal ini KORKOT

---

<sup>11</sup> Adriati Amri, Masyarakat Kelurahan Ujung Sabbang, Wawancara pada tanggal 5 Februari 2021

<sup>12</sup> Rasmiati, Masyarakat Kelurahan Ujung Sabbang, Wawancara pada tanggal 6 Februari 2021

(kordinator kota) KOTAKU menambahkan keterangan dalam hal partisipasi pada saat pelaksanaan program ini berlangsung di Kelurahan Ujung Sabbang. Seperti halnya yang disampaikan pada saat wawancara di kantor KOTAKU.

“Keaktifan masyarakat dalam hal partisipasi pengerjaan program ini terbilang aktif yah, mulai dari masukan dan saran, juga halnya bagi bapak-bapak atau para pemuda yang turut dalam pengerjaan drainase maupun jalanan. Hal ini juga belaku bagi ibu-ibu rumah tangga misalnya disekitar rumah yang dikerja swadainya biasa menyediakan kue-kue atau minuman bagi para pekerja yang mengerjakan drainase. Adapula juga warga masyarakat yang membantu berupa bahan materil seperti halnya pasir maupun semen”.<sup>13</sup>

Hal serupa demikian dijelaskan oleh pak Muhtar selaku KORKOT (kordinator kota) pada program KOTAKU. Pak Muhtar mengatakan keaktifan partisipasi masyarakat tidak hanya dilihat dari berupa kontribusi keterlibatan dalam pelaksanaan pembangunan secara fisik atau turun langsung menjadi tukang. Namun partisipasi masyarakat juga ada dalam bentuk kontribusi secara material, dalam hal menyumbangkan pasir, semen, dan lain-lain. Adapula masyarakat yang menyediakan berupa konsumsi kepada tukang yang mengerjakan pembangunan fisik (Lorong, selokan, bak sampah).

#### 1.1.1.4 Kendala Dalam Pelaksanaan Program KOTAKU

Dalam setiap pelaksanaan suatu program tentunya tidak selalu berjalan dengan mulus, tentunya ada kendala atau hambatan pada setiap berjalannya. Kendala yang didapat dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Ujung Sabbang diantaranya ialah masih terdapat warga masyarakat yang belum berpartisipasi aktif sepenuhnya. Rendahnya motivasi masyarakat untuk mengikuti program KOTAKU, kurangnya SDM untuk mendukung keberlangsungan kegiatan program KOTAKU.

“Yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program ialah dari tim penggerak, dalam hal ini kurang bergerak cepat dalam hal kordinasi dengan masyarakat.

---

<sup>13</sup> Muhtar, Kordinator Kota KOTAKU, Wawancara pada tanggal 9 Februari 2021

Ada sebagian dari masyarakat juga yang kurang kesadarannya akan pentingnya program ini, dalam artian tidak ikut berpartisipasi pada proses pembangunan”.<sup>14</sup>

Bapak Andi Aco mengungkapkan pernyataan tersebut atas dasar yang dilihat pada saat proses pelaksanaan pembangunan program KOTAKU (kota tanpa kumuh) yang berada dikawasan jl. Kalimantan. Kendala yang terjadi pada proses pelaksanaan pembangunan juga disampaikan oleh Alif yang merasakan akan kendala tersebut.

“Disini dek masyarakat kurang dalam hal motivasi juga, itu salah satu faktor yang menjadi kenapa ada beberapa yang tidak ikut dalam partisipasi pada pembangunan program KOTAKU ini. Ada juga masyarakat yang memang kurang peduli akan lingkungannya, tidak berbaurnya dengan tetangga juga menjadi faktor, karena merasa segan berpartisipasi”<sup>15</sup>.

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat yang merasakan pelaksanaan pembangunan program KOTAKU ini menceritakan kenda-kendala pada saat program terlaksana. Meskipun tahapan sosialisasi kegiatan telah dilaksanakan kepada masyarakat, pada perencanaan saat sebelum program ini berlangsung tetapi tentunya itu belum dapat diterima dan dilaksanakan pada setiap elemen masyarakat.

### **1.1.2 Dampak Program KOTAKU (kota tanpa kumuh) di Kelurahan Ujung Sabbang Parepare**

Pembangunan pada dasarnya memiliki dampak yang menyertainya. Dalam pembangunan infrastruktur pada program KOTAKU tentu ada keluaran yang dihasilkan. Hal ini kemudian menjadi fokus utama peneliti dalam Analisis Dampak Pembangunan Berbasis Infrastruktur Program KOTAKU (kota tanpa kumuh) di

---

<sup>14</sup> Andi Aco, Masyarakat Kelurahan Ujung Sabbang, Wawancara Pada tanggal 3 Februari 2021

<sup>15</sup> Muhammad Alif, Masyarakat Kelurahan Ujung Sabbagn, Wawancara pada tanggal 4 Februari 2021

Kelurahan Ujung Sabbang Parepare. Pada hasil penelitian ini tentunya peneliti menelaraskan pada teori yang digunakan, yaitu teori dampak. Adapun dampak tersebut ialah dampak positif dan negatif.

#### 1.1.2.1 Dampak Positif Program KOTAKU (kota tanpa kumuh) di Kelurahan Ujung Sabbang Parepare

Dalam penelitian ini dampak positif dapat dilihat dalam pembangunan dari aspek ekonomi, seperti dapat dilihat dari indikator penyerapan tenaga kerja, yaitu dari sektor ekonomi. Melalui analisis isi pada hasil wawancara kepada responden, diketahui dampak ekonomi yang diberikan dari Program KOTAKU terjadi baik dalam hal pendapatan maupun pekerjaan.

Berbagai program dalam pelaksanaan pembangunan KOTAKU di kelurahan Ujung Sabbang telah banyak membantu warga masyarakat. Hal ini berdasarkan dari hasil wawancara ke salah satu masyarakat yang berada di wilayah Jl. Kalimantan yang merasakan dampak tersebut mengatakan.

“Dengan adanya program KOTAKU di Kelurahan ini, saya sangat bersyukur karena telah memberdayakan saya selaku masyarakat di Rw 9 Jl. Kalimantan ini. Saya menjadi tukang dari beberapa masyarakat di Kelurahan Ujung Sabbang, meskipun upah yang saya terima dari pelaksanaan pembangunan selokan tidak seberapa tapi saya merasa bersyukur, karena ini salah satu pekerjaan yang bisa sebagai penambah pencaharian nafkah saya diluar pekerjaan saya sebagai buruh kasar di Pelabuhan Cappa Ujung”.<sup>16</sup>

Selain dampak positif dari segi ekonomi, dari segi sosial juga bisa dirasakan. Hal ini bisa dinikmati oleh warga masyarakat, tentunya dari jalanan atau lorong yang tadinya kurang bagus menjadi bagus, yang tadinya selokan atau gorong-gorong selalu tergenang air saat curah hujan meningkat bisa teratasi atau setidaknya bisa berkurang dengan adanya program KOTAKU.

---

<sup>16</sup> Muhammad Alif, Masyarakat Kelurahan Ujung Sabbagn, Wawancara pada tanggal 4 Februari 2021

“Kami dan insyaAllah masyarakat sangat menikmati dengan adanya program Kotaku di kelurahan Ujung Sabbang. Program ini sangat bagus dan membantu bagi masyarakat, terutama bagi banyak masyarakat yaitu dengan adanya perbaikan gorong-gorong. Saya sangat suka dengan program KOTAKU, karena spek KOTAKU terjamin betul dan sesuai dengan apa yang diharapkan”.<sup>17</sup>

Hasil wawancara dengan dengan masyarakat juga merasakan dampak positif dari pelaksanaan program. Hal ini didasari karena ekspektasi yang diharapkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan bagusnya penataan jalannya ataupun dengan saluran-saluran drainase, otomatis persoalan macam genangan air, jalan yang rusak dapat teratasi.

Dengan adanya penyerapan tenaga kerja yaitu dari sektor ekonomi maka secara langsung berkaitan dengan konsepsi dalam Islam. Pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, maka tujuan dasar dan paling essensial dari pembangunan tidak lain adalah mengangkat kehidupan manusia yang berada pada lapisan paling bawah atau penduduk miskin, kepada tingkatan yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Salah satu upaya peningkatan kualitas kehidupan di Kelurahan Ujung Sabbang pada pelaksanaan program KOTAKU (kota tanpa kumuh) dengan membuka lapangan kerja. Lapangan kerja yang mempekerjakan masyarakat dalam tahapan pembangunan fisik, pengerjaan drainase, lorong, pengecatan tembok lorong dan lain-lain. Dengan adanya lapangan kerja yang terbuka, secara langsung membantu perekonomian bagi masyarakat.

Selain itu pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu peningkatan kualitas hidup. Pembangunan infrastruktur memang menjadi salah satu upaya yang

---

<sup>17</sup>Andi Aco, Masyarakat Kelurahan Ujung Sabbang, Wawancara Pada tanggal 3 Februari 2021

dipakai pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan pada seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Adanya pemerataan pembangunan diharapkan mengurangi tingginya kesenjangan yang selama ini ada. Meskipun pembangunan infrastruktur yang ada di Kelurahan Ujung Sabbang ini seperti drainase, pengecoran lorong, namun upaya pemerintah ini dinilai sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas hidup. Hal itu dibuktikan setelah pengerjaan drainase dan pengecoran lorong yang mampu mengurangi bahkan mencegah terjadinya genangan air disaat hujan maupun bencana banjir.

“Kami dan insyaAllah masyarakat sangat menikmati dengan adanya program Kotaku di kelurahan Ujung Sabbang. Program ini sangat bagus dan membantu bagi masyarakat, terutama bagi lingkungan yaitu perbaikan gorong-gorong. Saya sangat suka dengan Kotaku, mengapa demikian, karena spek Kotaku terjamin betul dan sesuai dengan apa yang diharapkan, program KOTAKU melaksanakan dengan prioritas daerah kumuh”.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu responden, ibu Rasmiati masyarakat Jl. Tarakan, mengatakan bahwa pelaksanaan program pembangunan KOTAKU (kota tanpa kumuh) di Kelurahan Ujung Sabbang sudah sesuai dengan apa yang diinginkan.

Sebagai salah satu wujud dari konsepsi pembangunan sosial ekonomi dalam Islam yaitu pembangunan yang seimbang atau merata. Pembangunan memang menjadi salah satu cara yang dipakai pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan pada seluruh wilayah di negara kita yaitu Indonesia. Pembangunan yang seimbang, yaitu pembangunan yang harmoni, tidak terjadi kepincangan pembangunan di berbagai sektor dan wilayah. Sebagaimana dalam konsep pembangunan ekonomi Islam adalah keseimbangan. Pembangunan ekonomi tentunya tidak lepas pada keseimbangan antara kebutuhan sosial masyarakat tentunya.

---

<sup>18</sup> Rasmiati, Masyarakat Kelurahan Ujung Sabbang, Wawancara pada tanggal 5 Februari 2021

Hal ini tentunya berkaitan erat dengan adanya pembangunan infrastruktur yang terjadi seperti saat ini. Kota Parepare sendiri menjadi wilayah yang pembangunan infrastruktur gencara dikebut. Hal ini tercermin dengan adanya program KOTAKU yang berlangsung di beberapa Kelurahan yang ada di Kecamatan kota Parepare.

Berbicara terkait pembangunan yang seimbang adalah berbicara tentang pemerataan pembangunan. Pemerataan dalam artian bukan membangun disetiap lini. Namun memprioritaskan mana yang lebih cenderung untuk dilakukan proses pelaksanaan pembangunan. Seperti hal di Kelurahan Ujung Sabbang yang terpilih dalam proses pelaksanaan program KOTAKU. Hal ini didasari karena kelurahan ini masuk dalam kategori kumuh di Kelurahan Ujung Sabbang g kota Parepare, dengan adanya pembangunan yang berfokus pada wilayah kumuh diharapkan dapat mengurangi tingginya kesenjangan yang ada selama ini.

#### 1.1.2.2 Dampak Negatif Program KOTAKU (kota tanpa kumuh) di Kelurahan Ujung Sabbang Parepare

Selain ada dampak positif dari program KOTAKU ada pula dampak negatif dari program KOTAKU, dimana dampak negatif dari program ini adalah yang berkaitan dengan pembangunan pelaksanaan di Kelurahan Ujung Sabbang. Dampak negatif dikaitkan dengan pengaruh negatif yang akan mendatangkan akibat negative

Masyarakat yang tentunya mendapat dampak dari pelaksanaan pembangunan ini, karena masyarakatlah yang bermungkim didaerah tempat pembangunan ini dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu responden sebagai berikut.

“Yang menjadi dampak negatif mungkin dari pembangunan fisik KOTAKU di kelurahan Ujung Sabbang terkhusus untuk wilayah tarakan yaitu persampahan. Hal ini dikarenakan bak sampah yang tidak memiliki penutup,

dan memiliki ukuran kecil yang tidak mampu menampung sampah warga masyarakat yang ada di lorong, kemudian tidak memiliki penutup bak, sehingga bak sampah yang telah dibangun ini kadang sampahnya kemana-mana juga menimbulkan bau tidak sedap bagi masyarakat yang melintas di dekat bak sampah”<sup>19</sup>.

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat yang merasakan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan pembangunan fisik KOTAKU yaitu mengenai persampahan. Melalui hasil pengamatan, peneliti mengunjungi bak sampah yang dimaksud oleh ibu Rasmiati yang menjadi dampak negatif.

“Bak sampah yang dibangun pada ujung lorong yang berada di wilayah Jl. Tarakan memang menjadi masalah bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan bak yang berukuran kecil untuk masyarakat yang bermukiman di dalam lorong. Akibatnya sampah tercemari disekitar bak sampah, akibat tidak mempunya menampung banyaknya sampah dari masyarakat yang bermukim di lorong. Selain itu tempat sampah yang tidak memiliki penutup”<sup>20</sup>.

Peneliti juga menanyakan terkait dampak negatif yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pembangunan program KOTAKU di kelurahan Ujung Sabbang. Dalam hal ini peneliti menanyakan hal tersebut dari tim KOTAKU yang bertindak sebagai salah satu pengawas dalam proses pelaksanaan.

“Mengenai dampak negatif, terkadang masyarakat tidak memperhatikan apa yang telah dibangun disekelilingnya. Dalam hal ini pemeliharaan pembangunan fisik, contoh kecil ketika ada sesuatu yang rusak seharusnya bisa diperbaiki sedikit demi sedikit”<sup>21</sup>.

Hasil wawancara itu diketahui bahwa dampak bukan saja dari hasil pembangunan fisik, melainkan bagaimana masyarakat juga dalam menjaga hal yang telah dibangun atau dikejutkan kemudian diperhatikan dalam hal ini diperbaiki kalau misalkan masalah itu skala kecil.

---

<sup>19</sup> Rasmiati, Masyarakat Kelurahan Ujung Sabbang, Wawancara pada tanggal 5 Februari 2021

<sup>20</sup> Observasi Peneliti, Observasi Pada Tanggal 5 Februari 2021

<sup>21</sup> Iwan, Faskel KOTAKU, Wawancara Pada tanggal 9 Februari 2021

“Dampak negatifnya itu dari masyarakat yang tidak memperhatikan drainase yang telah dibangun, padahal seharusnya itu bukan hanya tanggungan dari pemerintah kelurahan lagi melainkan partisipasi dari masyarakat semua yang yang bermukim didaerah pembangunan yang telah dibangun”<sup>22</sup>.

Ibu Adriati menambahkan terkait dampak negatif yang terjadi di daerahnya, melihat ada komponen pembangunan yang dinilai luput dari perhatian masyarakat. Dampak ini menjadi indikator dampak negatif yang terjadi di Kelurahan Ujung Sabbang.

### **1.1.3 Keberlanjutan Program KOTAKU (kota tanpa kumuh) di Kelurahan Ujung Sabbang Parepare**

#### **1.1.3.1 Keberlanjutan Program KOTAKU**

Tahapan keberlanjutan merupakan tahapan yang secara menerus dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Kegiatan keberlanjutan meliputi Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di Kelurahan Ujung Sabbang.

1. **Komitmen Pemerintah Kelurahan Ujung Sabbang, LKM dan masyarakat dalam Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh**

Realisasi program atau kegiatan diarahkan paling utama di kawasan permukiman kumuh terlebih dahulu, dengan penataan kawasan permukiman kumuh secara berkelanjutan khususnya pada lokasi RW09 (RT01-RT02) yang menjadi prioritas penanganan di Kelurahan Ujung Sabbang. Pemerintah dan masyarakat setempat di Kelurahan Ujung Sabbang juga berkomitmen akan menjaga aset yang

---

<sup>22</sup> Adriati Amri, Masyarakat Kelurahan Ujung Sabbang, Wawancara Pada Tanggal 5 Februari 2021

dibangun baik yang bersumber melalui pendanaan APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota. Selain itu masyarakat juga berkomitmen merawat dan memelihara aset yang dibangun dengan adanya pembentukan KPP (Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan).

Pemerintah kelurahan Ujung Sabbang berkomitmen dalam penanganan kawasan pemukiman kumuh. Mulai dari realisasi, peetaan, hingga komitmen masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Amin Koppe selaku pihak pemerintah kelurahan.

“Kami selaku pemerintah kelurahan dalam hal ini berkomitmen tentunya, dengan apa yang telah ada dan apa saja yang akan datang. Dalam hal ini dimaksud adalah penanganan masalah perkumuhan yang menjadi fokus dari program KOTAKU tentunya. Dengan merawat aset yang telah dibangun yang tentunya akan dikontrol oleh KPP.”<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah kelurahan menyampaikan bahwa peranan pemerintahan dalam proses keberlanjutan sangatlah penting. Hal ini dikarenakan perlunya merawat aset yang telah dibangun pada pelaksanaan program pembangunan KOTAKU.

2. Pemerintah dan kelembagaan LKM (Lembaga keswadayaan masyarakat)

Sipakamase siap membangun kolaborasi

untuk mewujudkan Kelurahan Ujung Sabbang bebas dari permukiman kumuh.

“Kolaborasi juga penting sebagaimana untuk mewujudkan harapan meninggalkan kekumuhan pada kelurahan atau kesan kumuh”.<sup>24</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah kelurahan menyampaikan bahwa pentingnya kolaborasi antara pihak pemerintah kelurahan dan kelembagaan

<sup>23</sup> Amin Koppe, Pemerintah Kelurahan Ujung Sabbang, Wawancara pada tanggal 29 Februari 2021

<sup>24</sup> Amin Koppe, Pemerintah Kelurahan Ujung Sabbang, Wawancara pada tanggal 29 Februari 2021

LKM Sipakamase atau elemen masyarakat demi terwujudnya harapan kelurahan yaitu meninggalkan kekumuhan dan kesan kumuh.

3. Kelembagaan LKM Sipakamase berkomitmen akan terus memperbaiki dan meningkatkan kapasitas masyarakat guna mempersiapkan berbagai kemungkinan kebutuhan realisasi kegiatan yang ada. Terutama dari sisi

UPK

dan perangkat kelembagaan LKM Sipakamase.

“Perbaikan adalah kewajiban kami selaku warga masyarakat, kami akan laksanakan dengan partisipasi masyarakat sebagaimana ini adalah bentuk keberlanjutan dari program KOTAKU. Hal ini akan kami komunikasi dan kordinasikan kepada LKM dan masyarakat”.<sup>25</sup>

Berdasarkan keterangan atau wawancara dengan pihak kelurahan menyampaikan bahwa perbaikan menjadi prioritas bagi warga masyarakat. Karena hal ini adalah sudah menjadi tanggung Bersama dalam keberlanjutan program pelaksanaan KOTAKU (kota tanpa kumuh).

4. Pemerintah dan kelembagaan LKM Sipakamase siap membangun kolaborasi

untuk mewujudkan Kelurahan Ujung Sabbang bebas dari permukiman kumuh.

“Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan KOTAKU kolaborasi antara kelembagaan, masyarakat, dan pemerintah kelurahan semua terlibat. Apalagi kalau urusan kolaborasi untuk mewujudkan kelurahan yang bebas dari permukiman kumuh. Karena kami telah sepakat untuk mewujudkan amanat dari KOTAKU, sebagaimana tentunya kita sebagai masyarakat Kelurahan Ujung Sabbang pasti merasa senang dan bangga kalau hal itu dapat kita wujudkan Bersama”.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Amin Koppe, Pemerintah Kelurahan Ujung Sabbang, Wawancara pada tanggal 29 Februari 2021

<sup>26</sup>Amin Koppe, Pemerintah Kelurahan Ujung Sabbang, Wawancara pada tanggal 29 Februari 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak amin koppe selaku pihak pemerintah Kelurahan Ujung Sabbang bahwa kolaborasi merupakan unsur penting dan wajib dalam upaya mewujudkan Kelurahan Ujung Sabbang yang bebas dari kesan kumuh. Hal ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan sejumlah pihak yang turut andil dalam program KOTAKU.

Keberlanjutan dilakukan agar masyarakat tetap aktif merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk perbaikan lingkungan serta kualitas hidupnya. Karena tujuan dari program KOTAKU adalah menjadikan masyarakat menjadi mandiri dalam menyelesaikan masalah.

“Dari segi pemeliharaan terjadi setelah selesainya program, dari proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pertanggung jawaban. Setelah kegiatan ini selesai diserahkan kepada LKM, kemudian LKM menyerahkan kepada PPK dalam hal ini Dinas PU, kemudian Dinas Pu kembalikan lagi ke Kelurahan. Kemudian kelurahan yang memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Kelompok Pengelola dan Pemanfaatan (KPP). Kelompok ini yang sebenarnya mengerjakan jika ada kegiatan terkait pengontrolan”.<sup>27</sup>

Keberlanjutan program KOTAKU bukan hanya mengenai pelaksanaan pembangunan program-program yang baru, melainkan keberlanjutan program juga ialah bagaimana komitmen partisipasi pihak Pemerintah Kelurahan Ujung Sabbang bersinergi dengan warga masyarakat dalam hal pemeliharaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pak Iwan selaku FASKEL pihak KOTAKU, tentunya dengan merawat dan menjaga asset yang telah dibangun.

Pihak LKM juga sering mengontrol KPP (kelompok pemelihara dan program), sampai dimana mereka punya kerja. Tugas kelompok pemelihara yaitu mengontrol selokan yang buntu, dan sebisa mungkin melakukan kerja bakti untuk penanganan hal tersebut.

---

<sup>27</sup> Muhtar, KORKOT KOTAKU, Wawancara Pada Tanggal 9 Februari 2021

### 1.1.3.2 Harapan Masyarakat

Dengan adanya pelaksanaan pembangunan infrastruktur program KOTAKU (kota tanpa kumuh) di Kelurahan Ujung Sabbang tentunya meninggalkan harapan bagi masyarakat. Hal ini tentunya berdasar pada hasil pembangunan fisik yang telah terbangun, mulai dari pengerjaan selokan yang menyulap menjadi lorong, revitalisasi selokan, dan pembangunan bak sampah atau penyediaan tempat sampah.

"Harapan saya dengan adanya ini program, mungkin agar ini program dapat berlanjut secara terus-menerus".<sup>28</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Andi Aco menyampaikan harapan kepada peneliti terkait harapan dan mungkin mewakili dari masyarakat yang berada di Kelurahan yang sama. Tidak hanya masyarakat, pihak Pemerintah Kelurahan selaku yang mengawasi program pelaksanaan ini juga menyimpan harapan keberlanjutan pelaksanaan program ini. Seperti yang disampaikan saat itu.

"Kami selaku pihak pemerintah menunggu kejelasan terkait apa lagi yang dicanangkan dari pihak KOTAKU di tahun-tahun kedepan".<sup>29</sup>

Begitupula harapan yang disampaikan oleh pihak pemerintah Kelurahan akan keberlanjutan program ini. Pemerintah Kelurahan menunggu konfirmasi dari KOTAKU apakah ada pencaangan terkait pelaksanaan pembangunan, entah itu perbaikan infrastruktur fisik atau pembangunan yang baru.

### 1.1.3.3 Evaluasi

Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintahan kelurahan, BKM/LKM, TIPP, dan masyarakat untuk menjamin setiap kegiatan terlaksana dengan kualitas baik. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah program sudah sesuai

---

<sup>28</sup> Andi Aco, Masyarakat Kelurahan Ujung Sabbang, Wawancara Pada Tanggal 4 Februari 2021

<sup>29</sup> Amin Koppe, Pemerintah Kelurahan Ujung Sabbang, Wawancara Pada Tanggal 2 Februari 2021

dengan rencana dan mencapai target pencapaian visi Permukiman dan pengurangan luas kumuh. Salah satu bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi seperti Review setiap tahapan kegiatan, Audit keuangan/kegiatan secara internal maupun eksternal, Laporan tahunan untuk melaporkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai rencana dan hasil kegiatan

Evaluasi kegiatan dilaksanakan secara terbuka, setiap masyarakat dapat menghadiri ketika diadakan rapat evaluasi. Semakin sering masyarakat mengikuti evaluasi program maka akan semakin bagus, karena dapat mengetahui bagaimana progress pembangunan infrastruktu di wilayahnya.

“Khusus untuk pemaparan evaluasi disetiap kegiatan selesainya disuatu kelurahan, ada yang diamakan RWT (Rembuk Warga Tahunan). Pemaparan ini ditampilkan ke warga masyarakat bahwa kegiatan sudah selesai. Titik mana yang sudah terlaksana, sisa kegiatan mana yang belum terlaksana, dan tingkat kekumuhan yang sekarang sebelum dan setelah dikerjakan program Kotaku. Jadi warga setempat dapat mengetahui poin kekumuhan dari sebelum terlaksana sampai terlaksannya programs, yang tadinya kumuh menjadi lebih tertata”<sup>30</sup>

Pada tahapan evaluasi pelaksanaan program dilakukan apabila telah dilakukukan pelaporan pertanggung jawaban pada proses pelaksanaan. Dalam evaluasi ada yang dikatakan RWT (rembuk warga tahunan). RWT ini dilaksanakan dikantor Kelurahan Ujung Sabbang, masyarakat bisa hadir untuk melihat data realisasi program KOTAKU yang telah terlaksana di Kelurahan Ujung Sabbang. Seperti yang dikatakan oleh pak Iwan saat peneliti melakukan wawancara. Adapula paparan data terkait format tingkat perhitungan kekumuhan pada Kelurahan Ujung Sabbang, yang program pelaksanaan pembangunan telah terealisasi dijelaskan pak Iwan sebagai berikut.

“Berdasarkan data untuk realisasi program yang telah terlaksana, kami

---

<sup>30</sup> Muhtar, KORKOT KOTAKU, Wawancara Pada Tanggal 9 Februari 2021

memiliki format perhitungan yaitu R nol. R nol ialah tujuh indikator yang muncul, adapun yang muncul pada saat selesai penanganan ditahun 2019 ujung sabbang. Sesuai dengan data yang ada di R nol menunjukkan bahwa datanya bukan 0 melainkan angka 19 yang artinya sudah masuk kategori ringan. Penanganan Kotaku sebenarnya ada 3 kategori, yaitu yang pertama kategori kumuh ringan, kumuh sedang, dan kumuh berat. Jadi khusus untuk kelurahan Ujung Sabbang masuk dalam kategori kumuh ringan.”<sup>31</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Iwan terkait pelaksanaan pembangunan program KOTAKU (kota tanpa kumuh) di Kelurahan Ujung Sabbang pada tahun 2019 menunjukkan paparan data. Paparan data yang dimaksud adalah tingkat penanganan kumuh di Kelurahan Ujung Sabbang.

Dalam tahapan evaluasi ini Kelurahan Ujung Sabbang memiliki tingkat kekumuhan pada poin 19, artinya masuk dalam kategori kumuh ringan. Sebelum pelaksanaan program KOTAKU terlaksana di Kelurahan Ujung Sabbang, Kelurahan ini masuk dalam kategori kumuh sedang menurut pihak Kelurahan

---

<sup>31</sup> Iwan, Fasilitator KOTAKU, Wawancara Pada Tanggal 9 Februari 2021